REPLIKASI IDEOLOGI PENDIDIKAN ORDE BARU DI TENGAH LIBERALISASI PENDIDIKAN KONTEMPORER INDONESIA

Mila Trisnawati, Yuliati*

Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5 Malang, Indonesia
*Corresponding author, email: yuliati.fis@um.ac.id

doi: 10.17977/um063.v5.i12.2025.3

Keywords
Education of Orde Baru
Hegemony
Resistance
Liberalization

Abstract
This article analyzes the reproduction of New Order educational ideology in Indonesia and its transformation within the context of contemporary educational liberalization. Using a qualitative descriptive method through a literature review, this study highlights how the New Order regime employed education as an instrument of political control, ideological indoctrination, and social engineering through centralized policies, uniform curricula, and militaristic discipline. Despite this hegemonic structure, various forms of resistance emerged from students, intellectuals, cultural movements, religious institutions, and civil society organizations. Entering the post–New Order era, the education sector experienced a shift toward liberalization characterized by privatization, marketization, and the growing influence of neoliberal values such as efficiency, competition, and meritocracy. This study argues that neoliberal ideology has been replicated in contemporary education through managerialism, commodification, and market-oriented curricula, resulting in increased inequality and the diminishing humanistic functions of education. Nonetheless, emerging forms of resistance demonstrate society's efforts to reclaim education as a public good. The findings emphasize the need for critical negotiation among the state, market, and civil society to ensure that education in Indonesia remains inclusive, democratic, and socially justice.

Kata kunci
Pendidikan Orde Baru
Hegemoni
Resistensi
Liberalisasi

Abstrak
Artikel ini menganalisis replikasi ideologi pendidikan Orde Baru di Indonesia serta transformasinya dalam konteks liberalisasi pendidikan kontemporer. Berdasarkan metode kualitatif deskriptif melalui studi pustaka, penelitian ini menunjukkan bahwa rezim Orde Baru menjadikan pendidikan sebagai instrumen kontrol politik dan ideologis melalui sentralisasi kebijakan, penyeragaman kurikulum, serta penerapan nilai-nilai militeristik. Meskipun demikian, berbagai bentuk resistensi muncul dari mahasiswa, intelektual, lembaga keagamaan, komunitas seni, dan masyarakat sipil. Pada era pasca–Orde Baru, pendidikan mengalami pergeseran menuju liberalisasi yang ditandai oleh privatisasi, komersialisasi, dan penetrasi ideologi neoliberalisme yang menekankan efisiensi, kompetisi, dan orientasi pasar. Penelitian ini berargumen bahwa ideologi baru tersebut direplikasi melalui manajerialisme kampus, marketisasi kurikulum, serta pengurangan peran negara, yang berdampak pada meningkatnya ketimpangan dan terkikisnya nilai humanistik dalam pendidikan. Namun demikian, resistensi dari berbagai kelompok menunjukkan adanya upaya untuk mempertahankan pendidikan sebagai hak publik dan ruang demokratis. Temuan penelitian ini menegaskan perlunya negosiasi kritis antara negara, pasar, dan masyarakat untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif, adil, dan berorientasi pada keadilan sosial.

1. Pendahuluan

Pendidikan menjadi bagian dari upaya strategis untuk memajukan sumber daya manusia sekaligus menjadi pilar utama suatu bangsa dalam mengembangkan sistem sosial, ekonomi, dan politiknya. Secara umum, pendidikan merupakan proses pengembangan diri yang meliputi peningkatan kemampuan individu maupun kelompok untuk membentuk watak, karakter, serta

memperkaya pengalaman hidup (Citriadin, 2019). Proses ini tidak hanya bersifat personal, tetapi juga kolektif, sehingga pendidikan menjadi pondasi penting untuk menghadapi berbagai tantangan zaman. Di sisi lain, pendidikan juga dijadikan sebagai landasan utama dalam mencapai tujuan nasional yang selalu berkembang mengikuti dinamika setiap masa. Hal ini terlihat jelas pada masa Orde Baru di Indonesia, dimana pendidikan tidak hanya berperan sebagai sarana pengembangan potensi, tetapi juga terintegrasi erat dengan pengaruh politik dan kebijakan pemerintah yang bertujuan mengarahkan pembangunan nasional secara sistematis dan terkendali (Hasdiana et al., 2024). Dengan demikian, pendidikan masa Orde Baru memiliki peran ganda sebagai agen transformasi sosial maupun instrumen politik yang kemudian menjadi penting untuk menganalisis bagaimana kebijakan pendidikan dirancang dan diimplementasikan terutama dalam konteks sejarah.

Periode Orde Baru sendiri berlangsung dari tahun 1968 hingga 1998, ketika pemerintahan Orde Lama yang dipimpin Soekarno digantikan oleh Soeharto. Pemerintahan Orde Baru dikenal dengan sistem pemerintahan absolut dan otoriter, di mana pengambilan keputusan dilakukan tanpa melibatkan peran serta rakyat. Pada masa ini, sistem pendidikan difungsikan sebagai instrumen strategis pemerintah untuk pembangunan nasional sekaligus pengendalian ideologi (Ramadhan et al., 2024). Sistem pendidikan yang tidak luput dari pengaruh tersebut menjadi pola sentralisasi yang ketat, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Keadaan pendidikan yang sangat terpusat ini kemudian memicu kebutuhan akan transformasi besar menuju sistem pendidikan yang memberi ruang lebih luas bagi kebebasan dan desentralisasi dalam konteks pendidikan kontemporer.

Perubahan paradigma yang signifikan dalam pendidikan kontemporer menjadi salah satu bagian dalam transformasi pendidikan dari masa Orde Baru. Sistem pendidikan sentralistik dan otoriter sebagai alat pemerintahan masa Orde Baru, mulai beralih menjadi desentralisasi pada masa setelah Orde Baru, dimana paradigma pendidikan mulai bergeser dari orientasi kuantitas ke kualitas menuju kebebasan pendidikan. Liberalisasi dalam pendidikan mulai diberlakukan pada masa setelahnya yaitu masa pendidikan kontemporer, pada masa tersebut hadir pendidikan yang lebih membuka ruang berbagai keberagaman dan menyesuaikan perkembangan teknologi (Utami et al., 2024). Hadirnya liberalisasi pendidikan pada masa kontemporer tentu merupakan kelanjutan dari proses panjang pendidikan masa lalu. Dengan demikian, liberalisasi pendidikan yang berkembang pada masa kontemporer yaitu masa pasca Orde Baru hingga saat ini menjadi landasan penting sekaligus tantangan baru dalam peralihan sistem pendidikan dari masa Orde Baru menuju era kontemporer.

Tantangan dalam dunia pendidikan menimbulkan berbagai persoalan kompleks yang harus dihadapi oleh para pemangku kebijakan, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Salah satu faktor utama yang kerap menjadi kendala adalah dominasi kepentingan elit birokrasi yang sering kali mengedepankan agenda politiknya sendiri, terlepas dari urgensi peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan di Indonesia (Arifin & Akhirudin, 2022). Situasi ini menyebabkan perumusan dasar-dasar pendidikan tidak pernah lepas dari pengaruh politik kepemimpinan yang tengah berkuasa pada waktu itu, sehingga arah dan tujuan pendidikan nasional bersifat dinamis dan cenderung menyesuaikan diri dengan kepentingan penguasa. Kondisi ini mengakibatkan birokrasi pendidikan kurang memberikan otonomi kepada pemerintahan daerah maupun satuan pendidikan dalam mengambil keputusan strategis, sehingga kualitas pelayanan pendidikan sering terhambat (Ndoluanak et al., 2023). Dengan demikian, tantangan pendidikan di Indonesia tidak hanya soal kualitas sumber daya dan infrastruktur, tetapi juga persoalan mendasar pada dinamika politik dan birokrasi yang membatasi efektivitas pengelolaan pendidikan secara mandiri di tingkat lokal.

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dalam penulisannya peneliti mempertimbangkan adanya penelitian terdahulu, diantaranya sebuah artikel berjudul "Sejarah Pendidikan Indonesia Masa Orde Baru: Menguak Keberhasilan dan Kegagalan Kebijakan Pemerintah Orde Baru dalam Bidang Pendidikan", karya Fauzan Syahru Ramadhan, Nur Ramadhani Catur Anggoro, Muhammad Setyo Pramono dan Garin Ahmad Indradaffa pada tahun 2024 yang diterbitkan oleh Chronologia: Journal of History Education, perbedaan artikel tersebut dengan artikel yang akan ditulis adalah pada artikel tersebut terfokuskan pada pendidikan di masa Orde Baru sedangkan artikel yang akan ditulis juga membandingkannya dengan pendidikan masa kontemporer. Selanjutnya artikel berjudul "Kebijakan Pendidikan Pemerintah Indonesia Era Orde Baru Serta Pengaruhnya terhadap

Pendidikan Islam di Indonesia", karya Sasmita Hasdiana, Nurazizah Alamsyah, Kasful Anwar US, dan Sya'roni Sya'roni pada tahun 2024 yang diterbitkan oleh ALFIHRIS: Jurnal Inspirasi Pendidikan, perbedaan artikel tersebut dengan artikel yang akan ditulis adalah pada artikel tersebut memfokuskan pendidikan orde baru pada pengaruhnya bagi pendidikan islam, sedangkan artikel yang akan ditulis memfokuskan pada pendidikan secara keseluruhan. Artikel ketiga berjudul "Pendidikan Humanistik Ki Hadjar Dewantara dalam Konteks Pendidikan Kontemporer di Indonesia" sebagai karya dari Yunita Noviani, Robi Muhamad Rajab, dan Anindya Nuzlatul Hashifah, pada tahun 2017 yang diterbitkan sebagai hasil Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP UNTIRTA 2017, perbedaan artikel tersebut dengan artikel yang akan ditulis adalah dalam artikel tersebut berfokus pada kacamata seorang tokoh dalam melihat pendidikan kontemporer, sedangkan dalam artikel yang akan ditulis berfokus pada pendidikan kontemporer secara menyeluruh bagaimana penerapan dan tantangannya. Dalam konteks tersebut, artikel ini berupaya mengkaji hegemoni pendidikan pada masa Orde Baru serta berbagai bentuk resistensi yang muncul sebagai respons terhadap kebijakan tersebut. Selanjutnya, pembahasan akan meluas pada proses liberalisasi pendidikan di era kontemporer, termasuk tantangan ideologi baru yang muncul serta bagaimana ideologi ini direplikasi dan diadaptasi dalam sistem pendidikan modern.

2. Metode

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka (*literature review*). Penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk menggali dan memahami sistem pendidikan masa orde baru serta kontemporer, begitu pula replikasinya. Penggunaan pendekatan, studi pustaka dimaksudkan untuk mengumpulkan data dengan jalan menelaah buku-buku, artikel jurnal, dan artikel media massa yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan (Sari & Asmendri, 2020). Selain itu, studi pustaka juga dilakukan untuk memperoleh basis penelitian-penelitian empiris yang relevan dengan topik permasalahan (Syahputra et al., 2020). Pada penelitian ini, penulis melakukan studi pustaka untuk menganalisis dan mengkonstruksi data guna menjawab persoalan yang diteliti. Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan sumber pustaka yang relevan dengan tujuan penelitian. Pada penelitian ini, sumber yang relevan mengenai sistem pendidikan orde baru, sistem pendidikan kontemporer, liberalisasi pendidikan kontemporer, serta paradigma-paradigma pada kedua masa. Selanjutnya, analisis data berdasarkan sumber dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2022). Seluruh data sebagai hasil telaah pustaka akan dianalisis dalam pengelompokan sesuai dengan tujuan penelitian meliputi, hegemoni pendidikan masa orde baru, resistensi terhadap hegemoni pendidikan orde baru, liberalisasi pendidikan kontemporer dan tantangan ideologi baru, serta Replikasi ideologi orde baru dalam liberalisasi pendidikan kontemporer. Dalam penelitian ini sumber pustaka yang digunakan meliputi artikel ilmiah yang diakses melalui e-journal, dan buku. Sumber pustaka yang relevan ditelaah hingga memperoleh pemecahan sesuai tujuan penelitian. Analisis data dilakukan secara berkelanjutan mulai sejak pengumpulan hingga penelitian selesai.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hegemoni Pendidikan Masa Orde Baru

Masa Orde Baru Indonesia di bawah kepemimpinan Soeharto berlangsung sejak 11 Maret 1966 hingga 21 Mei 1998 dan membawa corak baru pada kebijakan pendidikan nasional. Pada masa ini, terjadi perubahan paradigma yang signifikan, yaitu peralihan dari paham komunisme menuju penguatan Pancasila sebagai dasar dalam rencana pembangunan yang berkelanjutan. Pada masa ini pendidikan tidak lagi ditempatkan sebagai tujuan utama, melainkan difungsikan sebagai alat untuk mendukung perbaikan dan perkembangan ekonomi yang menjadi prioritas pemerintah, yang tersirat dalam rencana pembangunan lima tahun (REPELITA). Posisi yang sedemikian kembali diperkuat dengan perumusan kebijakan-kebijakan yang dijalankan melalui struktur administratif yang didominasi unsur militer (Hasdiana, 2024). Dominasi ini menyebabkan pemerintahan berjalan secara absolut dan otoriter, yang tercermin dari pembatasan kebebasan berpendapat serta pengaturan berbagai kepentingan oleh pemerintah tanpa pelibatan rakyat (Ramadhan, 2024). Kondisi tersebut menimbulkan dampak mendalam pada berbagai aspek kehidupan, termasuk dinamika pendidikan serta sosial politik di Indonesia.

Dalam konteks tersebut, orientasi pendidikan diarahkan untuk menunjang pembangunan nasional melalui penerapan sistem politik yang sangat sentralistik. Seluruh kebijakan pendidikan ditetapkan oleh pemerintah pusat, sedangkan sekolah hanya bertugas melaksanakan proses pembelajaran sesuai arahan tersebut (Loppies, 2023). Pendekatan ini mendorong penyeragaman cara berpikir dan bertindak sehingga pembangunan pendidikan lebih menitikberatkan kuantitas dibandingkan kualitas. Contohnya adalah Inpres No. 10 Tahun 1978, yang bertujuan menyamakan pemahaman tentang Pancasila serta membentuk "Manusia Pancasila" di seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pelajar hingga pegawai pemerintah. Sebagai pelaksanaannya, diperkenalkan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila yang dikenal dengan P4, serta mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Hal ini menegaskan bahwa pendidikan Orde Baru berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Namun, penerapan PMP justru menanamkan sikap taat mutlak kepada negara tanpa memperhatikan hak individu, sehingga menghasilkan pribadi yang cenderung apatis, penakut, dan sangat patuh kepada kekuasaan (Agista, 2023). Selanjutnya, ketika Nugroho Notosusanto menjabat sebagai Menteri Pendidikan (1983–1985), muncul mata pelajaran Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) yang menonjolkan peran Angkatan Darat dalam menghadapi PKI 1965–1966. Penyisipan materi ini semakin memperkuat unsur politis dalam kurikulum pendidikan, karena menurut Notosusanto, pengajaran tersebut bertujuan menguatkan jiwa, semangat, serta nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 pada generasi muda (Loppies, 2023).

Penyeragaman pendidikan tidak berhenti sampai di situ. Pemerintah juga memberlakukan kebijakan wajib belajar sekolah dasar guna memperluas pemerataan pendidikan. Awalnya, program wajib belajar yang ditetapkan berdurasi 9 tahun, namun karena pelaksanaannya menemui banyak kendala, kemudian diubah menjadi wajib belajar 6 tahun. Program ini berhasil diterapkan selama kurang lebih satu dekade sebelum pemerintah kembali berniat memberlakukan wajib belajar 9 tahun. Pada 2 Mei 1994, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, Presiden Soeharto secara resmi memberlakukan kembali wajib belajar 9 tahun yang diperkuat dengan keluarnya Inpres No. 1 Tahun 1994 (Loppies, 2023). Di samping itu, sistem pendidikan pada masa Orde Baru terbagi menjadi dua jalur utama, yaitu pendidikan umum dan pendidikan khusus. Pendidikan umum mencakup jenjang formal dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Sedangkan pendidikan khusus fokus pada pendidikan kejuruan yang disiapkan untuk memasuki dunia kerja. Pendidikan kejuruan ini berlangsung mulai tingkat menengah hingga tinggi dengan orientasi pada bidang teknologi, industri, perdagangan, pertanian, kerumahtanggaan, dan pelayanan jasa (Septian dan Ahmad, 2020).

Kontrol ketat juga diterapkan dalam berbagai aspek pendidikan sebagai bagian dari strategi penguatan pengaruh negara. Contohnya adalah penunjukan kepala sekolah yang loyal kepada rezim dan penyensoran buku teks, yang dilakukan agar materi pembelajaran tetap sesuai dengan ideologi pemerintah. Pendekatan serupa juga diterapkan dalam pendidikan keagamaan, di mana madrasah diawasi dan diarahkan agar selaras dengan ideologi nasional serta menjaga stabilitas sosial-politik (Loppies, 2023). Sistem pendidikan saat itu sangat dipengaruhi nuansa militerisme yang kuat. Pada semua jenjang, mulai dari dasar hingga menengah dan atas, nilai-nilai militer seperti kewajiban baris-berbaris serta pemberian hukuman fisik terhadap siswa yang melanggar aturan diterapkan secara rutin. Selain itu, di perguruan tinggi keberadaan resimen mahasiswa (menwa) menjadi gambaran nyata pengaruh militer dalam sistem pendidikan nasional (Kurniawan et al., 2025). Secara keseluruhan, kebijakan, kurikulum, dan segala pelaksanaan pendidikan pada masa Orde Baru mencerminkan pola serta ciri khas yang melekat pada pemerintahan saat itu.

3.2. Resistensi terhadap Pendidikan Orde Baru

Orde Baru lahir melalui mekanisme politik yang dirancang oleh para pelaku politik pada masa itu. Sistem politik yang diperkenalkan oleh rezim ini mampu menopang pergerakan serta dominasi Orde Baru. Sebagai pendiri sekaligus pemimpin, Soeharto berhasil menguatkan kekuasaannya dan mempertahankannya. Dalam menjalankan pemerintahannya, rezim Soeharto (dikenal sebagai rezim Orde Baru) menggunakan dua strategi untuk menyingkirkan dan melemahkan lawan politik yakni metode eksplisit dan metode implisit simbolik (Sudibyo, 1998 dalam Ningsih, 2024). Metode eksplisit dilakukan secara langsung melalui manipulasi terhadap mekanisme hukum formal, penggunaan instrumen hukum secara kooperatif maupun manipulatif, serta tindakan represi fisik dengan prosedur tertentu. Praktik ini terlihat pada pengendalian terhadap pers, serikat pekerja, organisasi mahasiswa, dan kelompok intelektual, yang dilakukan melalui perangkat hukum teknis, tekanan fisik, dan intimidasi psikologis. Sedangkan metode implisit lebih bersifat simbolis, yakni dengan melakukan delegitimasi terhadap lawan politik melalui

pembentukan dan pengaturan wacana resmi negara. Wacana ini dimanfaatkan untuk membentuk "kebenaran" versi pemerintah, sehingga pandangan tandingan tersingkir dari ruang publik (Ningsih et al., 2024).

Hegemoni pendidikan Orde Baru dibangun melalui sentralisasi kurikulum, kontrol ideologi lewat PMP, Penataran P4, serta depolitisasi kampus melalui Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK)/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK). Kebijakan pendidikan Orde Baru menempatkan sekolah sebagai instrumen reproduksi legitimasi negara dan stabilitas politik (Ramadhan et al., 2024; Safei & Hudaidah, 2020). Studi terbaru menegaskan bahwa sistem pendidikan masa itu dirancang bukan hanya untuk meningkatkan kemampuan akademik, tetapi untuk memproduksi warga yang patuh terhadap negara dan Orde Baru (Kusmawati et al., 2023). Namun hegemoni tersebut tidak berjalan tanpa perlawanan. Terdapat berbagai bentuk resistensi, baik terselubung maupun terang-terangan, yang dapat dipahami sebagai proses produksi counter-hegemony oleh masyarakat sipil.

Pertama, resistensi intelektual muncul melalui kegiatan akademik yang berlangsung di luar aturan formal negara. Kelompok studi mahasiswa, diskusi terbatas, hingga penerbitan jurnal kampus bawah tanah menjadi media penting untuk mengembangkan pengetahuan alternatif, termasuk teori kritis dan sejarah yang tidak disetujui negara. Temuan penelitian kontemporer menunjukkan bahwa meskipun Orde Baru membatasi ruang akademik, diskursus kritis di kampus tetap hidup, terutama di pusat-pusat pendidikan sejarah dan sosial (Ramadhan et al., 2024). Kedua, mahasiswa menunjukkan resistensi melalui pengorganisasian aksi bawah tanah setelah diberlakukannya Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK)/ Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK). Kegiatan diskusi kamar kos, kajian sosial-politik, dan gerakan solidaritas buruh dan petani menjadi bagian dari proses pendidikan kritis nonformal yang menentang dominasi negara. Berbagai penelitian menegaskan bahwa depolitisasi kampus justru memicu transformasi jaringan gerakan mahasiswa yang lebih adaptif dan tersembunyi (Kusmawati et al., 2023).

Ketiga, resistensi kultural dilakukan melalui seni, teater, dan sastra. Kritik terhadap otoritarianisme Orde Baru muncul melalui simbol dan satire yang dibawakan oleh kelompok seni seperti Teater Koma, Rendra, dan Emha. Dalam konteks pendidikan kultural, bentuk ekspresi seni ini menjadi ruang belajar publik yang menandingi narasi negara dan memperluas kesadaran sosial di luar kurikulum formal (Ramadhan et al., 2024). Keempat, resistensi muncul dari lembaga pendidikan non-negara seperti organisasi Islam, pesantren modern, dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa beberapa organisasi keagamaan terus melakukan pendidikan internal yang tidak sepenuhnya tunduk pada kontrol ideologis negara, termasuk mempertahankan kurikulum dan nilai-nilai keagamaannya sendiri (Adiyono & Abdurrohim, 2024). LSM seperti YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) dan WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) menjalankan pendidikan rakyat yang menjadi sarana pembentukan kesadaran kritis mengenai hak, keadilan, dan perlawanan terhadap model pembangunan yang represif.

Dalam bidang pendidikan sejarah, resistensi tercermin pada praktik pedagogis bahwa sebagian guru yang menggunakan sumber-sumber non resmi dan sejarah lokal sebagai penyeimbang narasi tunggal negara terkait G30S dan militer. Pengajaran sedemikian masih ada hingga saat ini, contohnya sekolah-sekolah di Cirebon menunjukkan salah satu warisan hegemoni pendidikan Orde Baru yaitu pengajaran sejarah dan nilai dalam sudut pandang narasi tunggal kepemimpinan Soeharto (Syadiyah, 2024). Temuan ini menegaskan bahwa hegemoni pendidikan Orde Baru tidak hanya menjadi fenomena sejarah, tetapi juga meninggalkan jejak ilmu pengetahuan yang bertahan sampai era kontemporer. Secara keseluruhan, berbagai bentuk resistensi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak sepenuhnya menjadi objek indoktrinasi negara, dimana produksi pengetahuan selalu dapat membuka ruang pembentukan kesadaran alternatif yang kritis. Pendidikan, sebagaimana ditegaskan dalam teori kuasa-wacana, tidak pernah netral, dan hubungan antara negara, lembaga pendidikan, serta masyarakat selalu dalam "perlombaan".

3.3. Liberalisasi Pendidikan Kontemporer dan Tantangan Ideologi Baru

Liberalisasi pendidikan kontemporer di Indonesia menandai transformasi sistem pendidikan dari instrumen publik menuju logika pasar dan komodifikasi, terutama setelah runtuhnya Orde Baru. Perubahan ini tampak melalui privatisasi lembaga pendidikan dan komersialisasi layanan pendidikan yang kian meluas (Salim et al., 2024), serta penguatan orientasi human capital dan

standar global seperti akreditasi internasional, benchmarking, dan sertifikasi kompetensi (Gani et al., 2022). Dalam kerangka ekonomi politik, pendidikan kemudian tidak lagi dipahami semata sebagai sarana pembentukan warga negara, tetapi sebagai komoditas dalam pasar tenaga kerja dan industri pengetahuan, sebagaimana dicatat oleh analisis mengenai kapitalisme pendidikan di Indonesia (Nur, 2022). Salah satu karakter utama liberalisasi pendidikan adalah meningkatnya peran aktor non-negara korporasi pendidikan, yayasan, hingga platform digital yang menggeser orientasi pendidikan ke arah kompetisi individual. Fenomena ini memperkuat logika neoliberalisme, yakni keyakinan bahwa kualitas pendidikan ditentukan kemampuan bersaing dalam pasar bebas (Djamhuri & Ekowati, 2024). Tekanan untuk mencapai sertifikasi, produktivitas, dan angka mutu tertentu berpotensi menyempitkan makna pendidikan sebagai proyek sosial dan humanis, sehingga aspek kritis dan kolektif semakin terpinggirkan (Rakhmani, 2024).

Liberalisasi juga membawa tantangan serius bagi keadilan pendidikan. Biaya pendidikan yang semakin tinggi dan ketimpangan fasilitas antara wilayah urban rural memperkuat stratifikasi sosial, menjadikan pendidikan sebagai ruang reproduksi kelas (Asni Sari et al., 2025). Di perguruan tinggi, pasar pendidikan menciptakan ketidaksetaraan akses yang signifikan, sebagaimana terlihat pada temuan tentang dampak marketisasi terhadap kualitas dan akses pendidikan tinggi (Esmati et al., 2024). Selain itu, negara semakin mengambil peran sebagai regulator ketimbang penyedia utama layanan pendidikan, suatu pola yang turut memperbesar porsi swasta dalam pembiayaan pendidikan (Maulana & Indriati, 2022).

Dalam konteks ideologi baru, masuknya nilai global seperti meritokrasi, kompetisi, standardisasi, dan efisiensi administratif tidak bersifat netral. Nilai-nilai tersebut membentuk habitus baru yang cenderung mengabaikan dimensi historis, budaya, dan lokalitas dalam pendidikan (Rakhmani, 2024). Kurikulum semakin diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja, sementara disiplin humaniora dan ruang kritis semakin terpinggirkan akibat tekanan teknokratis seperti link and match dan orientasi vokasional (Gani et al., 2022). Liberalisasi pendidikan juga memunculkan bentuk resistensi baru. Akademisi, guru, LSM, dan komunitas pendidikan memperjuangkan pendidikan yang inklusif, adil, dan humanis, termasuk kritik terhadap komersialisasi kampus serta ketimpangan digital (Salim et al., 2024). Kebijakan seperti Merdeka Belajar juga dipahami sebagai medan perlombaan antara logika pasar dan idealisme pendidikan publik yang menekankan kesetaraan dan kebermaknaan belajar (Rakhmani, 2024). Karena itu, masa depan pendidikan Indonesia bergantung pada bagaimana negara, pasar, dan masyarakat sipil menegosiasikan orientasi pendidikan apakah dominasi neoliberalisme akan terus menguat, atau muncul model pendidikan baru yang lebih demokratis dan berkeadilan sosial.

3.4. Replikasi Pendidikan Orde Baru dalam Liberalisasi Pendidikan Kontemporer

Liberalisasi pendidikan kontemporer di Indonesia memperlihatkan proses replikasi ideologi baru, terutama neoliberalisme, yang secara sistematis mengubah arah pendidikan dari hak publik menuju komoditas pasar. Replikasi ini tampak melalui privatisasi dan komersialisasi lembaga pendidikan, yang menyebabkan biaya pendidikan meningkat serta memperbesar ketimpangan akses, sebagaimana ditunjukkan bahwa kebijakan liberalisasi "meningkatkan dominasi sektor swasta dan komersialisasi pendidikan yang berdampak pada ketidaksetaraan kualitas dan akses" (Taruna et al., 2024). Dalam pendidikan tinggi, neoliberalisme direplikasi melalui manajerialisme kampus yang menggunakan logika akuntansi, audit kinerja, dan orientasi produktivitas, di mana universitas "beroperasi dengan mekanisme pasar dan mengadopsi bahasa akuntansi untuk menilai nilai kelembagaan" (Suhendro & Dewi, 2023). Efeknya, orientasi akademik yang semula menekankan pengembangan ilmu pengetahuan berubah menjadi orientasi ekonomi yang menempatkan mahasiswa sebagai konsumen dan perguruan tinggi sebagai penyedia jasa pendidikan, sebagaimana terlihat dalam "pergeseran universitas menuju model korporatis yang menekankan profitabilitas dan daya saing global" (Siregar, 2024).

Replikasi ideologi baru juga tampak dalam marketization kurikulum, yakni penyesuaian kurikulum terhadap kebutuhan pasar tenaga kerja global. Kebijakan seperti program vokasional, sertifikasi kompetensi, dan link and match merefleksikan orientasi pasar yang kuat, sehingga "pendidikan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan industri dan menurunkan peran pendidikan humaniora" (Rahman, 2022). Dalam konteks ini, standar internasional seperti akreditasi global,

benchmarking, dan indikator daya saing direplikasi ke dalam praktik pendidikan sehingga memperkuat nilai-nilai efisiensi, kompetisi, dan meritokrasi global (Ardiansyah & Yusuf, 2021). Transformasi ini turut menyebabkan penyempitan makna pendidikan, karena tujuan pendidikan semakin dilihat dari kontribusinya terhadap produktivitas ekonomi, bukan pembentukan warga negara kritis, sebagaimana dinyatakan bahwa neoliberalisme "menggeser pendidikan menuju fungsi utilitarian dan menjauh dari misi humanis-sosial" (Gunawan, 2023).

Kerangka neoliberalisme ini juga mendorong pengurangan peran negara, di mana negara bertindak lebih sebagai regulator daripada penyedia layanan pendidikan. Hal ini direplikasi melalui kebijakan deregulasi dan desentralisasi pembiayaan yang mengalihkan beban pendidikan ke keluarga dan institusi swasta, sehingga "pendidikan berubah dari hak dasar menjadi tanggung jawab individual" (Putri, 2023). Replikasi ideologi ini menghasilkan ketegangan antara prinsip konstitusional pendidikan sebagai hak publik dengan praktik pasar yang berorientasi profit, yang pada akhirnya memperkuat stratifikasi sosial dalam akses pendidikan (Taruna dkk., 2024). Situasi ini memperkuat kekhawatiran bahwa neoliberalisme dalam pendidikan justru cenderung memperdalam kesenjangan sosial. Proses komersialisasi dan alih fungsi negara menjadi regulator memberi peluang bagi institusi swasta untuk mengontrol akses dan kualitas pendidikan berdasarkan kemampuan ekonomi, menciptakan jarak yang semakin besar antara kelompok yang mampu dan yang tidak. Dengan demikian, agenda neoliberalisme ini tidak hanya berimplikasi pada kebijakan, tetapi juga membentuk realitas sosial yang menempatkan pendidikan sebagai simbol dan mekanisme reproduksi kelas.

Meskipun demikian, replikasi ideologi baru ini juga memunculkan resistensi akademik dan sosial, misalnya melalui kritik terhadap komersialisasi kampus, gerakan pendidikan inklusif, serta dorongan untuk mengembalikan nilai-nilai humanistik dalam pendidikan. Upaya ini tercermin dalam dorongan kurikulum yang lebih berpihak pada keadilan sosial dan pengetahuan lokal, di mana masyarakat menolak dominasi pasar dalam pendidikan dan menuntut pendidikan yang kembali pada orientasi publik dan demokratis (Gunawan, 2023). Dengan demikian, replikasi ideologi neoliberalisme dalam liberalisasi pendidikan kontemporer merupakan tantangan serius bagi masa depan pendidikan Indonesia, karena mengubah struktur, praktik, dan nilai pendidikan secara fundamental, sehingga membutuhkan respons kritis dari negara, akademisi, dan masyarakat sipil.

4. Kesimpulan

Dinamika pendidikan Indonesia menunjukkan pergeseran bentuk hegemoni dari dominasi ideologis dan politik negara pada masa Orde Baru menuju dominasi logika pasar dan neoliberalisme pada era kontemporer. Pada masa Orde Baru, pendidikan dikendalikan melalui kurikulum yang ideologis, sentralisasi kebijakan, depolitisasi kampus, serta budaya disiplin dan kepatuhan untuk memperkuat legitimasi kekuasaan, sedangkan pada era liberalisasi pendidikan menghadapi komersialisasi, privatisasi, kompetisi, dan orientasi pasar yang berpotensi menggeser fungsi pendidikan dari pembentukan warga kritis menjadi penyedia sumber daya manusia bagi kebutuhan ekonomi. Kedua bentuk dominasi tersebut sama-sama berdampak pada kebebasan berpikir, pemerataan akses, keadilan sosial, dan makna pendidikan sebagai hak publik. Namun demikian, pendidikan tidak pernah sepenuhnya menjadi ruang yang pasif karena mahasiswa, akademisi, lembaga keagamaan, masyarakat sipil, dan komunitas pendidikan terus menghadirkan berbagai bentuk resistensi serta wacana alternatif. Oleh karena itu, pendidikan perlu dipahami sebagai arena dinamis tempat hegemoni dan resistensi terus bernegosiasi, sehingga tantangan utama pendidikan Indonesia ke depan adalah membangun sistem yang tidak terjebak dalam kontrol ideologis maupun dominasi pasar, tetapi mampu menjamin pendidikan yang demokratis, inklusif, kritis, humanis, dan berorientasi pada keadilan sosial serta cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa.

Daftar Rujukan

Adiyono, A., & Abdurrohim, A. (2024). Resistance and resilience in changing Indonesia: The political struggle and movement of Hidayatullah. *Journal of Education and Islamic Studies*.

Ardiansyah, R., & Yusuf, M. (2021). Standar internasional dan dinamika kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia. *Jurnal Administrasi Pendidikan, 28*(2), 145–160.

Arifin, M., & Akhiruddin, F. (2022). Permasalahan dalam reformasi birokrasi dalam sektor pendidikan. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 16*(3). https://doi.org/10.35931/aq.v16i3.981

Citriadin, Y. (2019). *Pengantar pendidikan*. CV Sanabil.

Djamhuri, A., & Ekowati, W. H. (2024). Exploring Indonesian higher education neoliberalization: A discourse on the role of accounting. *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)*.

Esmati, S., Hanginiaina, R., & Tsitaire, J. (2024). The neoliberal political economy of higher education: Marketization and its impact on access and quality at Universitas Hasanuddin. *Journal of Governance and Public Administration (JOGAPA)*.

Gani, A. W., Malliongi, M. T., & Zainuddin, M. S. (2022). Neoliberalism and higher education in Indonesia (Re-scrutinizing the policy of the Independent Campus). In *Prosiding Seminar Nasional LP2M UNM*.

Gunawan, A. (2023). Neoliberalisme dan transformasi makna pendidikan dalam masyarakat kontemporer. *Jurnal Filsafat dan Pendidikan, 37*(1), 55–70.

Hasdiana, S., Alamsyah, N., Anwar, K. U. S., & Sya'roni, S. (2024). Kebijakan pendidikan pemerintah Indonesia era Orde Baru serta pengaruhnya terhadap pendidikan Islam di Indonesia. *ALFIHRIS: Jurnal Inspirasi Pendidikan, 2*(4). https://doi.org/10.59246/alfihris.v2i3.950

Kurniawan, D. A., Putri, A. D. W., & Pratama, Y. Y. (2025). Kebijakan kontroversial pemerintah Orde Baru di ranah pendidikan tinggi Indonesia dalam perspektif historis. *Mukadimah: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial, 9*(1).

Kusmawati, L. N., et al. (2023). Perkembangan pendidikan Indonesia setelah tahun 1965 sampai runtuhnya Orde Baru. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*.

Loppies, M. (2023). Pendidikan zaman Orde Baru: Upaya melanggengkan kekuasaan Soeharto. *Phinisi Integration Review, 6*(2).

Maulana, A., & Indriati, F. (2022). Kebijakan privatisasi pendidikan sebagai dampak dari globalisasi. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*.

Ndoluanak, Y. H., Tjalla, A., & Sarifah, I. (2023). Pengaruh politik arah perkembangan suatu bangsa (Kekuasaan terhadap konstruksi pendidikan). *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, 6*(4).

Ningsih, C. R., Siregar, S. F. A., & Harahap, R. (2024). Resistensi terhadap kekuasaan Orde Baru dan cerminan zaman dalam puisi "Peringatan" karya Wiji Thukul. *Jurnal Kewarganegaraan, 8*(1).

Noviani, Y., Rajab, R. M., & Hashihaf, A. N. (2017). Pendidikan humanistik Ki Hadjar Dewantara dalam konteks pendidikan kontemporer di Indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP UNTIRTA 2017*.

Nur, A. (2022). Kapitalisme pendidikan dan reinventing paradigma pendidikan Indonesia. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*.

Putri, N. K. (2023). Dampak deregulasi pendidikan terhadap akses dan keadilan sosial. *Jurnal Kebijakan Publik, 12*(4), 221–234.

Rahman, F. (2022). Marketisasi kurikulum dan marginalisasi pendidikan humaniora. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 17*(3), 201–214.

Rakhmani, I. (2024). "Merdeka Belajar": A cultural political economy of Indonesia's neoliberalising nationalist university. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*.

Ramadhan, F. S., Anggoro, N. R. C., Pramono, M. S., & Indradaffa, G. A. (2024). Sejarah pendidikan Indonesia masa Orde Baru: Menguak keberhasilan dan kegagalan kebijakan pemerintah Orde Baru dalam bidang pendidikan. *Chronologia: Journal of History Education, 6*(1). https://doi.org/10.22236/jhe.v6i1.11920

Safei, I., & Hudaidah, N. (2020). Sistem pendidikan umum pada masa Orde Baru (1968–1998). *Jurnal Humaniora dan Pendidikan*.

Salim, A., Manubey, J., & Kuswandi, D. (2024). Neoliberalisme dan komersialisasi pendidikan di Indonesia: Sebuah refleksi. *Jurnal Pendidikan*.

Sari, K. A., Fajriani, S. W., Gunawan, G., Zulqoifah, A., & Hartani, M. (2025). The commodification of education and inequality in Indonesia: A sociological perspective. *Priviet Social Sciences Journal*.

Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian pendidikan IPA. *Natural Science, 6*(1), 41–53. https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555

Siregar, M. H. (2024). Korporatisasi perguruan tinggi dan implikasinya terhadap identitas akademik. *Journal of Leadership, Policy and Social Perspectives, 5*(1), 45–62.

Sugiyono. (2022). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Suhendro, T., & Dewi, V. S. (2023). Neoliberalization of Indonesian higher education through accounting language. *Jurnal Ilmiah Akuntansi, 8*(1), 74–88.

Syadiyah, D. N. F. (2024). Integration of Soeharto's leadership values in history lessons on Indonesia's New Order era in senior high schools in Cirebon. *Indonesian Journal of History Education*.

Syahputra, M. A. D., Sariyatun, S., & Ardianto, D. T. (2020). Peranan penting sejarah lokal sebagai objek pembelajaran untuk membangun kesadaran sejarah siswa. *Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah, 4*(1), 85–94. https://doi.org/10.17509/historia.v4i1.27035

Taruna, D., Lestari, P., & Widodo, A. (2024). Privatisasi pendidikan dan ketimpangan akses pada era liberalisasi. *Jurnal Pendidikan Nasional, 14*(2), 113–129.

Utami, S. F. D., Aryadi, M. R. N., & Almauqy, M. F. F. (2024). Transformasi dan pengaruh kebijakan pendidikan pada masa Orde Baru di Indonesia. *Dewaruci: Jurnal Studi Sejarah dan Pengajarannya, 3*(1). https://doi.org/10.3783/-DEWARUCI.v2i9.2461